

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Menurut Subandi (2011:9-11), proses pembangunan mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industry atau jasa, perubahan kelembagaan baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara terencana lebih dirasakan sebagai bentuk usaha yang rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau sedang berkembang. Adapun menurut Rostow (dalam Abdul: 2004:89), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara maju.

Pembangunan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Dengan itu menurut (Rochajat, dkk, 2011:3) yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas Negara setiap tahunnya. Di bidang sosial, pembangunan diarahkan pada pengembangan nilai dan sikap dalam masyarakat yang kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan kegiatan yang produktif, yang terpenting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya kekuatan (*power*). Sedangkan di bidang ekonomi menurut Subandi (2011:13), diacukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan. Pemupukan modal sangat bergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, oleh itu perlu upaya untuk mencapainya.

Wijaya (2004, 169:170), menyatakan pemberdayaan masyarakat terutama di desa tidak cukup dengan hanya meningkatkan produktivitas, memberikan

kesempatan usaha yang sama atau hanya sekedar memberikan modal, tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses, yakni akses sumber daya, akses teknologi, akses pasar, dan akses sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut selain menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi, peran aktif kelompok masyarakat juga diperlukan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang dilaksanakan dengan kekeluargaan. Untuk mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses, yakni akses sumber daya, akses teknologi, akses pasar, dan akses sumber pembiayaan tersebut, salah satunya mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Nagari Ulakan Nomor 4 Tahun 2022 Bab 4 Pasal 10 berbunyi; organisasi BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) terpisah dari Pemerintah Nagari. Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa berperan sangat penting dalam pemberdayaan dan mengembangkan potensi desa, khususnya dalam mengelola perekonomian desa. Kehadiran BUMDes bertujuan untuk menjadi penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa fungsinya sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Di Sumatera Barat, desa disebut dengan nama “Nagari”. Nagari dalam menjalankan roda pemerintahannya diatur oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari. Begitu pula dengan BUMDes dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Dalam hal ini, pemerintah nagari harus menempuh pendekatan baru untuk menggerakkan roda perekonomian nagari dengan membentuk lembaga ekonomi nagari yang sepenuhnya dikelola masyarakat nagari, yaitu Badan Usaha Milik Nagari. Di Sumatera Barat terdapat beberapa nagari atau desa yang sudah mendirikan BUMNag atau BUMDes seperti pada tabel:

**Tabel 1.1 BUMNag Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Total Desa/Nagari	Total BUMDes/ BUMNag	Klasifikasi BUMDes/ BUMNag			
				Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Maju
1.	Pesisir Selatan	182	182	22	145	6	9
2.	Solok	74	72	62	9	0	1
3.	Sijunjung	62	61	18	16	17	10
4.	Tanah Datar	75	72	34	36	2	0
5.	Padang Pariaman	103	95	58	31	0	6
6.	Agam	82	79	47	26	0	6
7.	Lima Puluh Kota	79	71	42	29	0	0
8.	Pasaman	37	37	29	5	3	0
9.	Kepulauan Mentawai	43	41	36	5	0	0
10.	Dharmasraya	52	52	12	26	9	5
11.	Solok Selatan	39	38	16	0	20	2
12.	Pasaman Barat	19	19	3	15	0	1
13.	Kota Sawahlunto	27	23	4	19	0	0
14.	Kota Pariaman	55	50	24	25	1	0
Total		929	892	407	387	58	40

Sumber: Dinas PMD Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan data, Kabupaten Padang Pariaman merupakan Nagari atau desa yang memiliki BUMNag maju di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Diantara

BUMNag maju di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya adalah BUMNag Pesisir Ulakan Madani. Indikator BUMDes atau BUMNag maju, tumbuh, berkembang, dan rintisan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Indikator BUMNag/BUMDes Maju, Tumbuh, Berkembang dan Rintisan**

No.	Klasifikasi BUMNag/BUMDes			
	Maju	Tumbuh	Berkembang	Rintisan
	<b>Kepengurusan</b>			
1.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) telah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai tugas masing-masing	Pengurus ditetapkan SK Kades tapi belum melaksanakan kegiatan	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) telah melaksanakan kegiatan sebagian	Pengurus belum ditetapkan dengan SK Kades
	<b>Kerjasama</b>			
2.	BUMNag/BUMDes melakukan kerja sama antar desa dan pihak ketiga untuk pengembangan usaha	BUMNag/BUMDes melakukan kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga	BUMNag/BUMDes melakukan kerja sama antar desa dan pihak ketiga untuk pengembangan usaha	BUMNag/BUMDes belum menjalin kerjasama
	<b>Program Kerja</b>			
3.	Ada program kerja dan seluruhnya telah dilaksanakan	Ada program kerja, tetapi belum dilaksanakan	Ada program kerja, sebagian telah dilaksanakan	Tidak ada program kerja
	<b>Legalitas/Aturan</b>			
4.	BUMNag/BUMDes memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP dan Unit Usaha Berbadan Hukum	BUMNag/BUMDes memiliki Perdes, SK Kades dan AD-ART	BUMNag/BUMDes memiliki Perdes, SK Kades dan AD-ART, dan SOP	BUMNag/BUMDes belum memiliki Perdes dan SK Kades
	<b>Unit Usaha</b>			
5.	Mempunyai lebih dari 1 unit usaha dan semuanya berjalan	Mempunyai 1 unit usaha telah berjalan	Mempunyai lebih dari 1 unit usaha sebagian yang telah berjalan	Mempunyai 1 unit usaha belum berjalan
	<b>Pasar</b>			
6.	Produk usaha telah	Produk usaha	Produk usaha	Produk usaha

	go public (nasional dan internasional)	dipasarkan di tingkat Kecamatan	dipasarkan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	dipasarkan di lokal
	<b>Modal dan Aset</b>			
7.	Modal usaha dari penyertaan modal desa, masyarakat, hibah, dan kerjasama dengan pihak ketiga	Modal usaha dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat	Modal usaha dari penyertaan modal desa, masyarakat, dan hibah	Modal usaha dari penyertaan modal desa
	<b>Aset</b>			
8.	Jumlah aset lebih dari 1 Milyar	Jumlah aset lebih dari 200 juta dan kurang dari 500 juta	Jumlah aset lebih dari 500 juta sampai 1 Milyar	Jumlah aset kurang dari 200 juta
	<b>Dampak Sosial</b>			
9.	BUMNag/BUMDes memberikan penyediaan lapangan pekerjaan, daya beli, dan pelayanan kepada masyarakat	BUMNag/BUMDes memberikan penyediaan lapangan pekerjaan	BUMNag/BUMDes memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	BUMNag/BUMDes belum memberikan dampak sosial
	<b>Dampak Ekonomi</b>			
10.	BUMNag/BUMDes bekerjasama dan member keuntungan usaha yang ada di masyarakat	BUMNag/BUMDes merugikan usaha masyarakat	BUMNag/BUMDes menguatkan usaha masyarakat	BUMNag/BUMDes menutup usaha masyarakat
	<b>Dampak bagi Pembangunan Desa/Nagari</b>			
11.	BUMNag/BUMDes telah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari/Desa, masyarakat, dan pihak ketiga	BUMNag/BUMDes telah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari/Desa	BUMNag/BUMDes telah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari/Desa, masyarakat	BUMNag/BUMDes belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari/Desa

Sumber : BUMDes.Kadjen.id 2021

Sebagaimana diketahui, BUMNag Pesisir Ulakan Madani memenuhi syarat BUMNag atau BUMDes kategori maju. Banyak prestasi-prestasi dan

penghargaan yang diperoleh oleh BUMNag Pesisir Ulakan Madani, yakni pada yang terbaru pada tahun 2022, BUMNag berhasil meraih Harapan 1 dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). 50 besar wisata terbaik se-Indonesia, dalam ajang tersebut terdapat lebih dari 70.000 desa wisata Se-Indonesia, yang berhasil terjaring hanya sebanyak 3.419 desa wisata dari 34 Provinsi di Indonesia. Penilaian ini berdasarkan daya tarik pengunjung, homestay, toilet umum, souvenir, digital dan kreatif, CHSE dan kelembagaan ([padangpariaman.go.id](http://padangpariaman.go.id) 2022). Prestasi yang diraih oleh BUMNag Pesisir Ulakan Madani, mengundang banyak kunjungan. Arus kunjungan resmi yang dikemas dalam bentuk studi tiru, kaji banding, paket wisata dan *study tour* dari komunitas maupun lembaga Pemerintah ke kawasan ekowisata dan edukasi Green Talao Park. Rombongan kunjungan tersebut seperti anggota Pokdarwis se-Kabupaten Pesisir Selatan, rombongan pejabat DPMD Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dan rombongan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ([bangunpiaman.com](http://bangunpiaman.com) 2021).

Nagari Ulakan memiliki luas wilayah pesisir pantai sepanjang 4 km setelah pemekaran pada tahun 2016, dan kecamatan Ulakan Tapakis menjadi delapan nagari saat ini, yakni nagari tapakis, nagari ulakan, nagari seulayat ulakan, nagari sungai gimba ulakan, nagari manggopoh palak gadang, nagari sandi ulakan, nagari kampuang galapuang ulakan, nagari padang toboh ulakan (Kecamatan Ulakan Tapakis dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Padang Pariaman). Dimulai dengan pembangunan jalan menuju kawasan dengan menggunakan dana desa tahun 2015 dan 2017, dan mendapatkan pendampingan lewat Program Pilot Project Inkubasi Inovasi desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL), Kementerian Desa PDTT RI 2019 pemerintah bersama masyarakat nagari menyulap lahan seluas 15 hektar menjadi destinasi wisata dengan konsep Community Based Tourism (CBT). Destinasi ini diberi nama “Green Talao Park yang terletak di Korong Gantiang Tengah Padang, Kenagarian Ulakan.

Sebagai pusat pariwisata religi di Sumatera Barat melalui situs budaya non bendanya yaitu makam Syekh Burhanuddin sebagai pusat penyebaran agama Islam di Minang, menjadikan nagari Ulakan nagari yang ramai di kunjungi peziarah. Namun setelah pemekaran nagari, pemerintah nagari mengembangkan destinasi lain yang juga terkoneksi dengan makam Syekh Burhanuddin, mengusung tema Ekowisata dan Edukasi, destinasi Green Talao Park ini dikelola melalui Badan Usaha Milik Nagari Pesisir Ulakan Madani, yang bermitra dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari (KUEMNag) yang didampingi langsung oleh Pelaku Bisnis Profesional (PBP) yang terdiri dari asosiasi, agensi dan pelaku pariwisata yang professional di bidangnya seperti AELI (Asosiasi Experiential Learning Indonesia), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) yang tentunya bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat (kemenparekraf.go.id 2022).

BUMNag Pesisir Ulakan Madani adalah badan usaha yang berdiri pada tahun 2017. BUMNag mengelola usaha, memanfaatkan potensi dan menyediakan jasa pelayanan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022, Pasal 2 yang berbunyi; dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari, maka nagari Ulakan mendirikan BUMNag Pesisir Ulakan Madani. Organisasi BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) terpisah dari Pemerintahan Nagari (Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022, Pasal 10). Mengingat lembaga usaha ini merupakan lembaga yang terpisah dari pemerintah nagari, tapi badan usaha ini sebagai pemasukkan Pendapatan Asli Nagari. Adapun omset pendapatan BUMNag sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Omset Pendapatan BUMNag**  
**Tahun 2020-2022**

No.	Tahun	Rupiah
1.	2020-2021	860.041.000
2.	2022	68.786.000

*Sumber: Data Primer 2023*

Selama kurang lebih tiga tahun semenjak peresmian kawasan ekowisata dan edukasi Green Talao Park, kehadiran desa wisata ini banyak memberikan manfaat bagi pemerintah nagari dan masyarakat nagari. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan pemerintah nagari yakni menghasilkan Pendapatan Asli Nagari. Sedangkan manfaat yang dirasakan masyarakat adalah terbukanya kesempatan kerja, sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi. Konsep *Community Based Tourism* berhasil membangun kawasan ini dengan berbagai amenities seperti trekking talao sepanjang 1,8 km, gazebo, spot foto, wahana air, dan lain sebagainya. Untuk memperindah kawasan yang memprioritaskan karya dan memberdayakan masyarakat nagari sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan secara langsung menghasilkan Pendapatan Asli Nagari. Dibalik keberhasilan dari pengelolaan desa wisata ini, tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat lokal mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan, dan proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, meningkatkan pengetahuan individu, meningkatkan keterampilan.

Namun saat bulan April 2022, obyek wisata ini mengalami penurunan kunjungan wisatawan (lihat Tabel 5.2). Dari observasi yang telah dilakukan di obyek wisata ini, penurunan kunjungan dikarenakan fasilitas-fasilitas obyek wisata 'Green Talao Park' rusak, ikon dari obyek wisata ini yaitu trekking mangrovenya banyak yang rapuh dan sebagian ada yang patah. Berawal dari kerusakan fasilitas-fasilitas dan paket wisata obyek wisata ini, kurangnya kunjungan dan kurangnya pendapatan BUMNag dan berkurangnya pemasukan pendapatan asli nagari. Namun di saat observasi penulis lakukan pada Januari



2023, wisatawan ada yang masuk namun tidak sebanyak pada saat obyek wisata ini masih viral. Akibat dari kerusakan ini sangat berdampak pula dirasakan oleh kelompok-kelompok yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata seperti kelompok sadar wisata, kelompok sanggar seni, kelompok pengrajin, kelompok homestay, dan kelompok pedagang. Banyak dari mereka saat ini tidak beroperasi di obyek wisata 'Green Talao Park', masing-masing mereka saat ini aktif di luar kawasan obyek wisata. Tahun 2023 Pemerintah nagari bersama dengan masyarakat akan mengupayakan obyek wisata ini kembali aktif dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas dan menambah fasilitas yang baru. Memperbaiki fasilitas dan menambah fasilitas obyek wisata ini tujuannya agar menarik kembali kunjungan wisatawan pada saat obyek wisata ini pertama kali dibuka.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai program salah satunya adalah program desa wisata. Program pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan daya sekaligus sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah dengan mengelola potensi lokal. Melalui desa wisata tersebut masyarakat diuntungkan melalui banyaknya wisatawan yang masuk. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, yaitu Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata di pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota. Program desa wisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat.

Konsep desa wisata memiliki kaitan erat dengan partisipasi masyarakat lokal. Desa wisata yang merupakan program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa untuk dapat hidup dengan baik dengan memanfaatkan potensi desa, mengutamakan aspek konservasi alam, dan mengutamakan aspek partisipasi masyarakat dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dasar yang dibutuhkan pemberdayaan adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan

kemiskinan ini, masyarakat miskin harus mendapatkan sumber daya agar mereka dapat berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan secara lebih efektif.

Penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata juga telah dilakukan sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ngurah Ayu Rianawati (2017) mengenai Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Wisata di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi). Penelitian ini mengungkap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat di desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yakni menyamakan persepsi *stakeholders* terkait pembangunan pariwisata (*top-down* dan *Bottom-up approach*), meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pembangunan pariwisata, memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat setiap tahap pembangunan pariwisata, meningkatkan kesiapan masyarakat, meningkatkan kesiapan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan profesionalisme SDM lokal (melalui pendidikan dan pelatihan), mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat, memberikan stimulasi dan pendampingan usaha pariwisata berbasis masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh Hayana Muslimah (2022) Praktik Sosial Pengelola Badan Usaha Milik Desa Memberdayakan Masyarakat Dengan Community Based Tourism (CBT). Penelitian ini mengungkap praktik sosial pengelola BUM Desa memberdayakan masyarakat dengan CBT, yakni memperluas akses pasar bagi pengrajin anyaman bambu, menambah lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi Karang Taruna, dan penyertaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Sumiasih (2018) tentang Peran BUM Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Penelitian ini mengungkapkan eksistensi BUM Desa pasca diberlakukannya UU desa mengalami perkembangan, namun masih ada

desa di Bali termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum mendirikan BUM Desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pemerintah. Sementara itu penelitian oleh Sukri (2020) tentang Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Desa Wisata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues-Aceh. Penelitian ini mengungkap upaya pemerintah Kecamatan Blangkejeren adalah dengan pendekatan, program dulunya desa ganja sekarang menjadi desa wisata, petani kopi, kursus bahasa inggris, dan penguatan jiwa wirausaha masyarakat. sedangkan proses pemberdayaan masyarakat adalah penyadaran, perencanaan program desa wisata, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan desa wisata, komoditi petani kopi, dan kursus bahasa inggris.

Sementara itu, penelitian oleh Sinta Apriyani (2022) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian mengungkapkan dengan pengembangan desa wisata pemerintah desa dapat memberdayakan para pengrajin maupun masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo. 1) Tahap penyadaran, masyarakat terlibat dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kalurahan melalui ketua RT atau Pedukuhan yang ada di Kalurahan Bangunjiwo yang memiliki sentra kerajinan. 2) Tahap peningkatan kemampuan, masyarakat atau pelaku wisata ikut berpartisipasi dalam peningkatan kemampuan dengan ikut dalam pelatihan yang diadakan oleh pemerintah berupa pelatihan pengelolaan administrasi dan pengetahuan tentang manajemen pemasaran. 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, masyarakat sudah terlibat dalam kegiatan yang ada di desa wisata Kajigelem dan dari beberapa hasil kerajinan yang dihasilkan masyarakat ditampilkan untuk menarik wisatawan.

Penelitian oleh Aprilia Isnaini Nur Khasiati (2019) terkait Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Muslim Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Penelitian mengungkap strategi pengembangan desa wisata dilakukan melalui lima strategi yakni: 1) penetapan komponen produk desa wisata berupa daya tarik, akses, fasilitas pendukung, dan lembaga pengelola, 2) kerja sama dengan masyarakat dalam penyediaan paket wisata dan fasilitas pendukung, 3) meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa melalui kegiatan pelatihan terkait keterampilan maupun pengetahuan, 4) menciptakan branding berupa pembuatan symbol/logo serta produk khas desa yang memiliki nilai jual, 5) pemasaran online melalui Instagram, Facebook dan Youtube serta pemasaran offline melalui stasiun TV Nasional, dan aktif di pameran tingkat Kota, Nasional dan Internasional. Sedangkan, peran pengembangan desa wisata terhadap perekonomian bagi masyarakat muslim desa Jambu adalah meningkatkan keterampilan dan industri kecil menengah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menambah sumber pendapatan dalam keluarga. Sementara itu penelitian oleh Yasir, Yohannes Firzal, Chelsy Yesicha dan Andri Sulistiyani (2021) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Community Based Tourism* (CBT) dalam Mewujudkan Desa Wisata Koto Sentajo. Mengungkapkan kegiatan ini berhasil melakukan perubahan pada desa Koto Sentajo melalui pendampingan yang bekerja sama dengan Kemenparekraf. Kegiatan pemetaan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan telah menyulap desa ini menjadi desa wisata, meskipun belum mandiri. Pemberitaan yang luas ini dapat dijadikan modal dasar dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan wisata yang berbasis keindahan alam, kekayaan kuliner, dan kearifan lokal. Kegiatan pendampingan ini memberikan peluang terbukanya komunikasi yang erat antar stakeholder desa wisata.

Penelitian oleh Dayu Silviana, Marwan Arwani, Ika Pasca Himawati (2021) tentang Analisis Pengembangan Desa Wisata di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, Bengkulu. Mengungkapkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pembangunan fasilitas wisata. Keterlibatan Pokdarwis sebagai pengelola dilakukan dengan mengambil empat tahap yakni partisipasi dalam perencanaan dengan kegiatan penyampaian gagasan berupa kritik dan saran. Tahap pelaksanaan dalam bentuk partisipasi personel berupa gotong-royong sarana wisata, pemeliharaan lingkungan. Di sisi lain bentuk partisipasi keterampilan yang dilakukan masyarakat diwujudkan melalui kegiatan pembuatan souvenir wisata dan promosi di media sosial. Tahap pendayagunaan dilaksanakan dengan membuka peluang usaha bagi pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Tahap evaluasi, melakukan studi banding ke Desa wisata lainnya sebagai bahan pembandingan untuk melihat keberhasilan desa wisata Bukit Kaba (Silviana et al., 2021). Sementara penelitian oleh Nike Vonika (2022) tentang Ekowisata Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat pada Pengembangan Desa Wisata di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mengungkapkan ekowisata sebagai konsep berkelanjutan merupakan konsep yang digunakan dalam pengembangan desa wisata, yang mana penting memperhatikan konservasi alam dan budaya, partisipasi penduduk lokal, transfer pengetahuan kepada pengunjung dan bentuk wisata yang berukuran kecil dalam menjaga daya dukung lingkungan.

Penelitian oleh Aldivon Atok Pratidina Santoso (2022) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kalurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Mengungkapkan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata telah dilaksanakan dengan baik. Terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dengan menghadirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta telah terlaksana pengembangan SDM yang

dilakukan pemerintah Kelurahan Kandri. Tetapi, ada kekurangan yang mana di bagian pendanaan serta promosi.

Sementara penelitian oleh Dwiyanti Destiningrum (2018) tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Desa Wisata Kadisobo II, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman. Penelitian mengungkapkan proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kadisobo II melalui tiga tahap, yakni 1) penyadaran dengan memberikan pencerahan wawasan dan pengetahuan tentang desa wisata sehingga masyarakat yakin dan ikut terlibat dalam pengelolaan desa wisata, 2) pengkapasitasan dengan memberikan pelatihan olahan hasil pertanian, kuliner, outbond dan tracking, pengkapasitasan organisasi dengan restrukturisasi, dan pengkapasitasan sistem nilai dengan kesepakatan bersama, dan 3) pendayaan dengan memberikan kewenangan dalam mengelola usaha kepada kelompok dan anggotanya sehingga terwujud kemandirian masyarakat. Output dari pemberdayaan adalah perubahan pola pikir, pola kerja, sistem usaha, dan tetap mempertahankan sistem nilai.

Penelitian oleh Rahman, A. Faidlal, Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (2009) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kembang Arum. Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan masyarakat desa wisata yang dilakukan oleh pihak pengelola desa wisata Kembang Arum diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi (homestay), yakni 1) pertemuan, 2) pendampingan, 3) bantuan modal, 4) pembangunan sarana dan prasarana, 5) pembentukan organisasi desa wisata, dan 6) gotong-royong.

Beda dengan penelitian di atas, penelitian ini berangkat dari isu kegagalan BUMNag dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun masih terdapat ketidak

jelasan mengenai peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, ketidaksesuaian pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang sering ditemui melihat BUMNag di kabupaten Padang Pariaman, kurangnya pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi sangat penting untuk kelancaran suatu usaha. Tidak sedikit BUMNag yang akhirnya sulit berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMNag. Meskipun kepengurusan BUMNag telah dibentuk, namun implementasinya, pengurus BUMNag belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, masalah yang sering kali ditemui adalah kurangnya promosi oleh BUMNag. Dari kegagalan ini, kita dapat mencontoh kepada pengelolaan usaha BUMNag yang berhasil memberdayakan masyarakat. salah satunya fokus penelitian ini, yakni BUMNag Pesisir Ulakan Madani. Walaupun BUMNag Pesisir Ulakan Madani pada tahun 2023 mengalami sedikit masalah yang telah disinggung pada sebelumnya, BUMNag ini pada masanya mengalami kejayaan dan BUMNag pernah berhasil masuk dalam lima desa terbaik dan meraih Harapan I kategori “Kelembagaan Desa Wisata” pada tahun 2022.

Berdasarkan fenomena tersebut, fokus penulis pada penelitian ini yaitu pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh BUMNag pada saat awal pembangunan ini dilakukan, melihat bahwa BUMNag mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab itu, pola pengelolaan harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat agar usaha yang dijalankan keberlanjutan. Maka penelitian ini penting dilakukan, karena melihat kegagalan-kegagalan pengelolaan BUMNag dalam pemberdayaan masyarakat sehingga BUMNag sulit untuk maju. Penelitian ini mendeskripsikan BUMNag dalam pemberdayaan masyarakat, BUMNag Pesisir Ulakan Madani dalam meraih keberhasilan pengelolaan desa wisata dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan

sebagai instrumen BUMNag dalam penguatan otonomi nagari dan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Nagari Ulakan merupakan daerah yang tergolong komplit jenis pariwisatanya, baik wisata alam maupun wisata budaya. Nagari Ulakan memiliki kawasan estuaria atau talao yaitu hutan bakau dan mangrove, yang di dominasi nipah dan bakau yang kaya akan komoditi perairan payau, sebagai kegiatan mata pencaharian masyarakat dengan aneka ragam flora dan faunanya, yang tergabung dalam landscape alam yang indah seperti *sunset view*, dan keanekargaman hayati lainnya. Namun kawasan ini tidak tersentuh dan tertata dengan baik selama ratusan tahun. Lahan yang tidak produktif serta kegiatan penebangan liar dan perburuan satwa menjadi cikal bakal pemerintah nagari bersama masyarakat untuk mengantisipasi dan menghentikan kegiatan berdampak buruk terhadap lingkungan. Melalui misi konservasi lingkungan dan menjadikan kawasan ini sebagai suatu destinasi melalui ekowisata dan edukasi “Green Talao Park” yang dikelola oleh BUMNag Pesisir Ulakan Madani.

Obyek wisata Green Talao Park bangun pada akhir tahun 2019, sayangnya pada saat pandemic covid-19 menyerang Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menutup tempat-tempat wisata di setiap daerah. Di Juni 2020 kawasan wisata ini sudah resmi dibuka untuk umum dan sudah menarik banyak wisatawan. Destinasi wisata ini dikelola oleh BUMNag yang bermitra dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan kelompok usaha ekonomi masyarakat nagari (KUEMNAG), yang didampingi oleh Pelaku Bisnis Profesional (PBP) yang terdiri dari asosiasi, agensi dan pelaku pariwisata yang professional di bidangnya seperti AELI, HPI, PHRI, dan ASITA. Konsep CBT yang memberdayakan masyarakat nagari sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan yang secara langsung menghasilkan Pendapatan Asli Nagari.



Sebagaimana Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, perlunya mengembangkan desa wisata.

Dalam pengelolaan Kawasan ekowisata dan edukasi Green Talao Park, banyak prestasi yang diraih oleh BUMNag Pesisir Ulakan Madani yaitu berhasil masuk sebagai salah satu dari 50 Desa Wisata terbaik ADWI tahun 2022. Prestasi yang diraih oleh BUMNag Pesisir Ulakan Madani tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan Desa Wisata ini. Keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam proses pengelolaan, BUMNag bermitra dengan pokdarwis dan kelompok-kelompok profesional memberdayakan masyarakat lokal mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta tahap pendampingan. Melihat dari keberhasilan BUMNag Pesisir Ulakan Madani, namun masih banyak BUMNag di Kabupaten Padang Pariaman yang masih stagnan kategori berkembang. Bahkan ada BUMNag di Kabupaten Padang Pariaman diharuskan tutup, karena program usahanya sendiri tidak mensejahterakan masyarakat. BUMNag justru menjadi predator bagi masyarakat (suararantau.com 2021). Sebagaimana Pasal 1 Ayat 6 UU Desa Tahun 2014, menyatakan bahwa pendirian usaha sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, permasalahan sering ditemui melihat BUMNag di kabupaten Padang Pariaman, kurangnya pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi sangat penting untuk kelancaran suatu usaha. Tidak sedikit BUMNag yang akhirnya sulit berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMNag. Meskipun kepengurusan BUMNag telah dibentuk, namun implementasinya, pengurus BUMNag belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, masalah yang sering kali ditemui adalah kurangnya promosi. BUMNag yang pengelolaannya cukup baik serta memiliki output yang berkualitas, seringkali masih mengalami kendala dalam perihal promosi. Percuma jika potensi desa dikelola dengan baik, namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya

kendala promosi yang kurang. Hal tersebut tentunya pengurus BUMNag harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk lakukan promosi. Kurangnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha sangat berdampak ke penyebab BUMNag itu gagal. Sebagaimana usaha utama BUMNag harus memaksimalkan mungkin potensi nagari serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Intinya, pengurus BUMNag tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMNag sangat penting dalam keberhasilan usaha. Oleh sebab itu, penting diadakan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat.

Melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh BUMNag atau BUMDes pada umumnya. Terdapat BUMNag maju di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di nagari Ulakan, BUMNag ini ialah BUMNag Pesisir Ulakan Madani. Setelah berjalan hampir selama dua tahun pengeloaan, Green Talao Park sebagai icon wisata di nagari Ulakan dari 7 Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat dan 3 desa dan Kecamatan dari Provinsi Sumatera Utara dan Riau melakukan studi di kawasan ini. Kerja sama akademisi dan Perguruan Tinggi serta Dinas terkait memberikan ruang kepada BUMNag dan Pokdarwis dalam melakukan pendampingan kepada desa-desa yang ingin memajukan desanya menjadi desa wisata. hal ini diberikan melalui anugerah Pokdarwis dan BUMNag terbaik malalui Dinas PMD dan DISPARPORA Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Pemerintah pusat dan daerah turut bersinergi memberikan apresiasi kepada Green Talao Park, melalui kunjungan, penghargaan dan pendampingan dari Kemenko PMK RI, Kemendesa PDTT RI dan Kemenparekraf RI, untuk mewujudkan cita-cita menjadi destinasi yang unggul, unik dan berdaya saing untuk kemajuan pariwisata nagari.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Nagari dalam pembangunan pariwisata?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Umum

Menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik nagari dalam pembangunan pariwisata.

#### 2. Tujuan Khusus

1. Menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik nagari.
2. Menjelaskan cara keberhasilan program usaha oleh pengurus BUMNag.
3. Menjelaskan BUMNag memberikan peningkatan pendapatan asli nagari dan memberikan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjelaskan peran BUMNag dalam pemberdayaan masyarakat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Bagi akademik

Untuk pengembangan sosiologi pemberdayaan masyarakat, baik sumbangan teoritis maupun metodologi.

#### 1.4.2. Bagi kepentingan praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi Nagari Ulakan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat.

